

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN BUMDES DI
DESA TOAPAYA SELATAN KECAMATAN TOAPAYA KABUPATEN
BINTAN TAHUN 2018**

Suryati¹, Afrizal², Nazaki³

E-Mail: suryati.suryati1701@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Maritim Raja Ali Haji

ABSTRAK

Undang-Undang Tahun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa pasal 1 ayat (6) berbunyi Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Oleh karena itu Pemerintah Desa harusnya mampu melihat potensi yang ada didaerahnya, untuk dikelola bersama masyarakat, pemerintah desa, swasta dan pihak-pihak yang terlibat lainnya. Penelitian ini ingin mengetahui apakah *Collaborative Governance* dalam pengelolaan BUMDes ada dilakukan dalam memecahkan permasalahan yang ada pada BUMDes Mitra Karya Sejahtera pada tahun 2018. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Setelah dilakukan penelitian bahwa *Collaborative Governance* ada dilakukan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu Kelompok Tani dalam Pengelolaan BUMDes Mitra Karya Sejahtera pada tahun 2018. Adapun yang menjadi faktor penghambat adalah pihak BUMDes belum berani untuk melakukan kolaborasi pada sembarang pihak apalagi swasta, karena pihak BUMDes takut terjadi kecurangan dalam melakukan kolaborasi.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Pengelolaan, Badan Usaha Milik Desa

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

PENDAHULUAN

Salah satu pendapatan asli desa yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa ialah dengan mendirikan BUMDes, seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (6) yang berbunyi “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa disebutkan bahwa salah satu tujuan didirikannya BUMDes antara lain untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam peyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pengembangan basis ekonomi di perdesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program, namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama.

BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk

kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif.

Dengan lahirnya lembaga seperti BUMDes diharapkan akan menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa sebagai tempat kehidupan dan penghidupan. Bahkan lebih dari itu, Desa diharapkan akan menjadi pondasi penting bagi kemajuan bangsa dan Negara yang akan datang.

Kabupaten Bintan memiliki 34 BUMDes yang sudah terbentuk dan 2 BUMDes yang belum terbentuk yaitu Desa Pengikik dan Desa Dendun. Dari 34 BUMDes yang sudah terbentuk, ada 31 BUMDes yang dikatakan aktif. Berikut nama-nama Desa di Kabupaten Bintan yang telah membentuk BUMDes.

Tabel 1.1 Desa Yang Telah Membentuk BUMDes di Kabupaten Bintan

No	Kecamatan	Desa	Nama BUMDesa
1.	Teluk Sebong	Sri Bintang Pengudang Ekang Anculai Berakit Sebong Lagoi Sebong Perih	Bintan Lestari Pengudang Jaya Anugrah Ekang Maju Bersama Bina Bersama Sebong Perih Gemilang
2.	Gunung Kijang	Malang Rapat Teluk Bakau Gunung Kijang	Sahabat Bina Sejahtera Gemilang
3.	Seri Kuala Lobam	Busung Kuala Sempang Teluk Sasah	Dendang Bertuah Seri Kuala Raya Mitra Perdana
4.	Teluk Bintan	Pengujan Bintan Buyu Tembeling Penaga Pangkil	Mentari Bintang Tri Mufakat Bintan Bina Karya Penaga Maju Bersama Mitra Bahari

5.	Bintan Utara	Lancang Kuning	Jaya Gemilang
6.	Toapaya	Toapaya Toapaya Utara Toapaya Selatan	Sukses Jaya Gemilang Three Bhakti Karya Mitra Karya Sejahtera
7.	Tambelan	Kampung Hilir Kukup Pulau Pinang Kampung Melayu Batu Lepuk Mentebung Pulau Pengikik	Sehati Harapan Kita Sejiwa Maju Melayu Tunas Jaya Pejantan -
8.	Bintan Pesisir	Kelong Air Glubi Numbing Mapur	Kelong Berwirausaha Maritim Jaya Kurnia Jaya Mapur Mandiri
9.	Mantang	Mantang Besar Mantang Baru Mantang Lama Dendun	Mantang Sejahtera Mantang Baru Gemilang Karya Bersama -

Sumber: DPMD Kabupaten Bintan, 2018

Berdasarkan tabel Desa yang telah membentuk BUMDes di Kabupaten Bintan, ada 34 BUMDes yang terbentuk dan 31 BUMDes yang dikatakan aktif. Berikut jumlah BUMDes yang sudah terbentuk dan yang dikatakan aktif.

Tabel 1.2 Jumlah BUMDes yang terbentuk dan yang aktif

No.	Uraian	Jumlah
BUMDes yang terbentuk		
1.	Desa yang sudah memiliki BUMDes	34 Desa
2.	Desa yang belum memiliki BUMDes	2 Desa
Jumlah		36 Desa
BUMDes yang aktif		
1.	BUMDes yang aktif	31 Desa
2.	BUMDes yang tidak aktif	3 Desa
Jumlah		34 Desa

Sumber: DPMD Kabupaten Bintan, 2018

Dilihat dari tabel di atas ada BUMDes yang dikatakan aktif dan tidak aktif.

Berikut kategori dari BUMDes itu di katakana aktif dan tidak aktif:

1. Keaktifan anggota yang mengelola BUMDes tersebut.
2. Ada program yang dijalankan.
3. Dukungan dari pihak pemerintah Desa.
4. Sudah bisa memberikan kontribusi ke Desa atau belum.

Desa Toapaya Selatan merupakan desa di Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan yang letaknya strategis berbatasan dengan pemerintah Kota Tanjungpinang dan sebagai gerbang masuknya Kabupaten Bintan. Salah satu Desa yang telah mendirikan BUMDes yaitu Desa Toapaya Selatan yang didirikan pada tahun 2016. Termasuk BUMDes yang aktif di antara 34 BUMDes yang telah membentuk BUMDes di Kabupaten Bintan. BUMDes Toapaya Selatan diberi nama BUMDes Mitra Karya Sejahtera. Pendirian dan pengelolaan BUMDes di Desa Toapaya Selatan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2016. Yang didirikan pada tanggal 15 Februari 2016.

Tabel 1.3 Unit Usaha BUMDes Mitra Karya Sejahtera

No.	Unit Usaha	Bidang Usaha
1.	Pelayanan dan Jasa	Penyewaan Kios Penyewaan Papan Reklame Penyewaan Pick-up
2.	Perdagangan	Desa Mart
3.	Produksi	Penanaman Semangka Pertanian Jagung Produksi Jamur
4.	Kepariwisatan	Gokart/ATV Kamping Area

Sumber: Data Olahan Peneliti

Namun dalam menjalankan tiap unit usaha BUMDes mengalami masalah, yaitu dari bidang produksi jamur modal usaha yang diberikan belum ada sama sekali

pengembalian sehingga tidak ada keuntungan bagi BUMDes Mitra Karya Sejahtera. Sedangkan dalam menjalankan usaha BUMDes lainnya seperti penyewaan papan reklame dikatakan tidak berjalan karena letak penempatan papan reklame berhadapan dengan area sekolahan SD dan Masjid yang mengakibatkan banyak yang kurang berminat karena letaknya yang kurang startegis. Penyewaan Pick-up juga dikatakan tidak berjalan karena pick-up yang di beli untuk penyewaan menggunakan plat merah yang tidak bisa di sewakan karena ada kebijakan yang mengaturnya. Di unit usaha kepariwisataa juga mengalami masalah belum adanya lahan yang tepat untuk permainan ATV dan Kemping area tersebut.

Berdasarkan dari unit usaha pelayanan dan jasa, produksi, perdagangan dan pariwisata yang ada di BUMDes Mitra Karya Sejahtera. Bidang usaha yang memiliki pendapatan hanya 2 bidang usaha yaitu di unit usaha pelayanan dan jasa yaitu Penyewaan Kios dengan Pendapatan Rp. 31.950.000 dan di unit usaha produksi yaitu dibidang penanaman semangka dengan pendapatan Rp. 7.450.000. Dan ada pendapatan dari unit Perdagangan yaitu di bidang Desa Mart dengan pendapatan kotor Rp. 15.794.000. tetapi dari hasil pendapatan kotor tersebut sudah digunakan kembali untuk perputaran modal dan gaji karyawan sehingga penghasilan bersih belum terhitung. Berikut pendapatan pada tiap unit usaha di bidang usahanya masing-masing yang dikelola oleh BUMDes Mitra Karya Sejahtera pada tahun 2018:

Tabel 1.4 Pendapatan Pada Tiap Bidang Usaha

No.	Bidang Usaha	Pendapatan
1.	Penyewaan Kios	Rp. 31.950.000
2.	Penyewaan Papan Reklame	-
3.	Penyewaan Pick-up	-
4.	Desa Mart	Rp. 15.794.000

		(pendapatan kotor)
5.	Penanaman Semangka	Rp. 7.450.000
6.	Penanaman Jagung	-
7.	Prduksi Jamur	-
8.	Gokart/ATV	-
9.	Kemping Area	-

Sumber: Data Olahan Peneliti

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, fenomena yang terjadi pada BUMDes Mitra Karya Sejahtera diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Collaborative Governance* dalam pengelolaan BUMDes di Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan Tahun 2018”.

BAHAN DAN METODE

Collaborative Governance adalah konsep di dalam management pemerintahan sebagai proses fasilitasi dan pelaksanaan oleh berbagai institusi baik pemerintah, masyarakat, maupun NGOs yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah bersama yang tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi pemerintah saja.

Menurut Ansell dan Gash (dalam Arianti Devi & Satlita Lena 2018:812), proses dari kolaborasi dilakukan dalam beberapa tahapan. Suatu tahapan model kolaborasi menjadi penting untuk diperhatikan sebagai strategi dalam aspek pengelolaan suatu urusan publik. Meskipun proses kolaboratif sulit untuk dilaksanakan karena karakter-karakter dari setiap stakeholder yang berbeda satu dengan yang lainnya sebagai berikut:

- a. *Face to face dialoge* (Dialog Tatap Muka)

Semua bentuk *collaborative governance* dibangun dari dialog tatap muka secara langsung dari tiap stakeholder yang terlibat. Sebagaimana *collaborative governance* yang berorientasikan proses, dialog secara langsung sangat penting dalam rangka mengidentifikasi peluang dan keuntungan bersama. Dialog secara tatap muka langsung bukanlah semata-mata merupakan negosiasi yang alakadarnya. Dialog secara langsung ini dapat meminimalisir antagonisme dan *disrespect* dari antar stakeholder yang terlibat. Sehingga, stakeholder dapat bekerjasama sesuai dengan tujuan dan kebermanfaatannya bersama.

b. *Trust building* (Membangun Kepercayaan)

Buruknya rasa percaya antar stakeholder memang merupakan hal yang lumrah di awal proses kolaborasi. Kolaborasi memang bukan semata tentang negosiasi antar stakeholder, namun lebih dari itu merupakan upaya untuk saling membangun kepercayaan satu dengan yang lainnya. Membangun kepercayaan perlu dilakukan sesegera mungkin ketika proses kolaborasi pertama dilakukan. Hal ini diupayakan agar para stakeholder tidak mengalami egosentrisme antar institusi. Oleh karenanya, dalam membangun kepercayaan ini, diperlukan pemimpin yang mampu menyadari akan pentingnya kolaborasi.

c. *Commitment to the process* (Komitmen terhadap proses)

Komitmen tentunya memiliki relasi yang kuat dalam proses kolaborasi. Komitmen merupakan motivasi untuk terlibat atau berpartisipasi dalam *collaborative governance*. Komitmen yang kuat dari

setiap stakeholder diperlukan untuk mencegah resiko dari proses kolaborasi. Meskipun komitmen memang merupakan hal yang rumit dalam kolaborasi. Komitmen merupakan tanggung jawab dari stakeholder supaya memandang relasi yang dilakukan sebagai hal yang baru dan tanggungjawab tersebut perlu dikembangkan.

d. *Shared Understanding* (Pemahaman Bersama)

Pada poin yang sama dalam proses kolaborasi, stakeholder yang terlibat harus saling berbagi pemahaman mengenai apa yang dapat mereka (stakeholder) capai melalui kolaborasi yang dilakukan. Saling berbagi pemahaman ini dapat digambarkan sebagai misi bersama, tujuan bersama, obktivitas umum, visi bersama, ideologi yang sama, dan lain-lain. saling berbagi pemahaman dapat berimplikasi terhadap kesepakatan bersama untuk memaknai dan mengartikan suatu masalah.

e. *Intermediate outcomes* (Hasil sementara)

Hasil lanjutan dari proses kolaborasi terwujud dalam bentuk *output* atau keluaran yang nyata. Hal ini merupakan hasil proses yang kritis dan esensial dalam mengembangkan momentum yang dapat membimbing demi keberhasilan suatu kolaborasi. *Intermediate outcomes* ini muncul apabila tujuan yang mungkin dan memberikan keuntungan dari kolaborasi yang mana secara relative konkrit dan ketika “*small wins*” dari suatu kolaborasi dapat dimungkinkan terjadi.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:11) “Penelitian deskriptif kualitatif

adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambaran tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antar variabel satu dengan variable yang lainnya”.

Dasar penelitian ini adalah studi yang memfokuskan pada *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan BUMDes di Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan Tahun 2018. Penelitian ini dilakukan di Desa Taopaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan dengan dokus kepada Pengelola BUMDes Mitra Karya Sejahtera. Dalam proses pengumpulan data, penulis menetapkan sumber data yang sesuai dengan data yang dibutuhkan, yakni data skunder dan primer. Adapun informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BUMDes ialah lembaga sosial yang mengutamakan masyarakat desa melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Namun BUMDes sendiri bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penyediaan barang atau jasa yang disediakan untuk masyarakat desa. BUMDes juga merupakan wadah usaha bagi masyarakat desa yang memiliki semangat kemandirian, kebersamaan, dan kegotong-royong antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mengembangkan aset-aset lokal untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa.

BUMDes Mitra Karya Sejahtera membentuk unit usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, produksi, kepariwisataan, jasa dan pelayanan. Unit perdagangan tersebut berupa desa mart/mini market. Bidang produksi berupa penanaman semangka, penanaman jagung dan produksi jamur. Bidang kepariwisataan berupa *Gokart Area/ATV* dan *kamping Area*. Dan bidang pelayanan dan jasa berupa penyewaan kios, papan reklame dan penyewaan pick-up.

Untuk mengetahui *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan BUMDes di Desa Toapaya Selatan maka penulis menggunakan teori dari Ansell & Gash dalam Arianti Devi & Satlita Lena (2018:812) yaitu, *face to face dialoge* (dialog tatap muka), *trust building* (membangun kepercayaan), *commitment to process* (komitmen terhadap proses), *share understanding* (saling memahami), dan *intermediate outcomes* (hasil sementara).

Dari teori yang di gunakan dapat dilihat bahwa dalam Pengelolaan BUMDes di Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan Tahun 2018, BUMDes pernah melakukan *collaborative governance* dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu Kelompok Tani dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam pengelolaan di Bidang penanaman semangka berjalan sesuai dengan yang di harapkan.

a. ***Face to face Dialoge (Dialog Tatap Muka)***

Salah satu proses kolaborasi yang sangat penting adalah *Face to face dialog* (dialog tatap muka). *Face to face dialoge* juga merupakan pertemuan antar berbagai pihak dalam satu lokasi dan dalam waktu yang sama sehingga terjadinya dialog

secara langsung atau interaktif antara berbagai pihak tersebut untuk membahas suatu kepentingan bersama.

Proses kolaborasi *face to face dialoge* sudah berjalan dengan sesuai. Yang dilakukan dengan beberapa kali pertemuan yang bersifat formal mau pun non formal. Pertemuan dilakukan dengan pihak yang terlibat yaitu Kelompok Tani, Ketua Produksi dan Ketua BUMDes terkait kerjasama yang akan berlangsung dalam penanaman semangka.

Face to face dialoge pada BUMDes Mitra Karya Sejahtera sampai saat ini memang belum pernah melibatkan pihak swasta, hal ini di karenakan dari pihak BUMDes masih kurang yakin untuk melakukan kolaborasi dengan pihak swasta karena takut akan ada hal buruk yang terjadi seperti kecurangan pada saat melakukan kolaborasi nantinya. Namun untuk kedepannya rencana akan melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah yang terkait dengan kerjasama apa yang akan dilakukan seperti kerjasama dalam pengelolaan ekowisata dengan Dinas Pariwisata agar dapat menjadi salah satu jalan dalam melihat masalah didalam BUMDes serta mengetahui apa yang sedang dibutuhkan masyarakat pada saat ini.

b. *Trust Building* (Membangun Kepercayaan)

Trust Building adalah usaha yang membangun kepercayaan bahwa para pihak memang memiliki niat yang sama dalam upaya pencapaian tujuan bersama, *trust building* dapat dimulai dengan membangun komunikasi antar *stakeholder*. Sedangkan dalam melakukan kerjasama dengan kelompok tani tidak ditemukan masalah yang berarti serta adanya rasa kepercayaan antara pihak BUMDes dan kelompok tani.

Dalam hal ini tidak ada ditemukan masalah dalam pelaksanaan kerja sama dalam penanaman semangka karena sebelum melakukan kerjasama antara Pemerintah Desa, BUMDes Mitra Karya Sejahtera dan Kelompok Tani sudah membicarakan semua masalah terkait di dalam kerjasama. Yang sudah tertuang didalam MOU.

c. ***Commitment To Process*** (Komitmen terhadap Proses)

Komitmen tentunya memiliki hubungan yang kuat dalam proses kolaborasi. Komitmen merupakan motivasi untuk terlibat atau berpartisipasi dalam *collaborative governance*. Komitmen yang kuat dari setiap stakeholder diperlukan untuk mencegah resiko dari proses kolaborasi. Komitmen sendiri merupakan hal yang rumit dalam kolaborasi.

Dalam penelitian ini komitmen untuk kerjasama itu ada dilakukan di dalam MOU tentang perjanjian kerjasama, yang berhubungan terkait tentang pelaksanaan kolaborasi yang akan di lakukan Kelompok Tani dalam penanaman semangka. Dimana dalam membuat perjanjian dilibatkan aktor-aktor yang terlibat di dalam melakukan kerjasama yaitu Ketua BUMDes, Kelompok Tani, dan Kepala Unit Usaha.

Jika perjanjian itu di langgar oleh salah satu actor terlibat maka akan dikenakan sanksi. Sanksinya berupa sanksi secara persuasife yaitu tidak akan melakukan kerjasama lagi kepada pihak tersebut atau di *blacklist*. Sanksi sosial seperti melakukan pendekatan dan musyawarah terbaik dengan pihak terkait. Tetapi kenyataannya dalam melakukan kerjasama penanaman semangka tidak ada yang melanggar perjanjian yan sudah tertuang di dalam MOU.

d. ***Share Understanding (Pemahaman Bersama)***

Share Understanding dalam penanaman semangka ini yaitu saling berbagi pengertian dan pemahaman bahwa forum ini adalah milik tanggungjawab bersama, mengidentifikasi permasalahan agar memiliki pemahaman yang sama antar kelompok serta menyadari nilai-nilai dasar yang menjadi dasar dalam forum ini.

Berbagi pengertian dan pemahaman sudah dilakukan oleh BUMDes Mitra Karya Sejahtera dimana pada saat itu Kelompok Tani diberikan Pembinaan dalam Penanaman semangka. Sehingga bisa mempermudah kelompok tani untuk melakukan penanaman dengan hasil yang lebih memuaskan.

Untuk kesalah pahaman antar aktor memang tidak pernah terjadi, paling dalam hal sistem produksi yaitu masalah menentukan pupuk yang sesuai untuk penanaman semangka. Tetapi untuk menyelesaikan masalah tersebut dari pihak BUMDes Mitra Karya Sejahtera langsung melakukan musyawarah bersama.

e. ***Intermediate Outcome (Hasil Sementara)***

Intermediate Outcomes merupakan hasil sementara dari proses yang sedang berlangsung yang memberi manfaat dan bernilai strategis. Hasil sementara dari kerjasama penanaman semangka dirasa sudah sesuai dengan yang diharapkan walaupun belum berdampak besar bagi masyarakat desa Toapaya Selatan dan sudah memberikan pendapatan hasil desa walupun tidak besar.

Hasil sementara dari kerjasama penanaman semangka antara Pemerintah Desa, BUMDes Mitra Karya Sejahtera dan Kelompok Tani sudah dirasakan cukup sesuai karena sudah dapat berdampak kepada masyarakat Desa Toapaya dan mampu memberikan Pendapatan Asli Desa walaupun belum memuaskan. Dikarenakan dalam

penanaman semangka ini lahan yang digunakan untuk menanam tidak bisa dilakukan berkali-kali untuk menanamnya, hanya bisa ditanam 2 atau 3 kali saja dalam satu lahan. Dengan harapan kedepan kerjasama tetap berlanjut dan semakin meningkat berjalan dengan baik dengan bantuan modal, memberikan kontribusi ekonomi kepada masyarakat atau meningkatkan perekonomian masyarakat.

KESIMPULAN

Collaborative Governance dalam Pengelolaan BUMDes di Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan Tahun 2018 pernah dilakukan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu Kelompok Tani dalam penanaman semangka yang berjalan dengan baik.

Kerjasama yang dilakukan karena dari pihak Kelompok Tani kekurangan modal dalam penanaman semangka dan di pinjamkan juga aset BUMDes untuk melakukan penanaman semangka tersebut. Proses dari kerjasama antara Pemerintah Desa, BUMDes Mitra Karya Sejahtera dan Kelompok Tani berjalan dengan lancar dengan hal-hal yang tertuang di dalam *Memorandum Of Understanding (MOU)* atau nota kesepahaman yang sudah dibahas secara bersama sewaktu melakukan pertemuan langsung.

Hasil dari kerjasama dirasa sudah lumayan memuaskan, dalam satu kali penanaman panen dilakukan sekitar tiga atau empat kali. Untuk kedepannya pihak BUMDes Mitra Karya Sejahtera sudah merencanakan untuk melakukan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan di bidang Kepariwisata agar BUMDes Mitra Karya Sejahtera bisa memberikan Pendapatan Asli Desa yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2014. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Eko Priyo Purnomo, Rijal Ramdani, Rendra Setyadiharja, & Ady Muzwardi. *Collaborative Governance dalam Tata Kelola Hutan Berbasis Masyarakat*. Lembaga Penelitian Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Fattah, Nanang. 2006. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosakarya.
- La Oda Syaiful Islamy. 2018. *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*. CV Budi Utama.
- Manullang, 2012. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: UGM.
- Maryunani, 2008. *Pembangunan BUMDes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Moleong, Lexy J, 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif fan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surya Putra, Anom, 2015. *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Syafiie, InuKencana. 2004. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Perca.
- Terry G.R. 2006. *Asas-Asas Manajemen*. Jakarta: PT. Renika Cipta.

B. Dokumen

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha MilikDesa.

Peraturan Desa Toapaya Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

C. Jurnal

Ade Febrian, R. (2016). *Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (Tinjauan Konsep dan Regulasi)*. Jurnal.Pemerintahan dan Birokrasi Vol II, No. 1, 2016.

Arianti Devi, Satlita Lena (2018). *Collaborative Governance Dalam Pengembangan Konservasi Mangrove Baros di Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul*. Jurnal. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.

Junaidi (2016). *Collaborative Governance dalam Upaya Menyelesaikan Krisis Listrik di Kota Tanjungpinang*. Jurnal. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Lukito, Tri Haryanto, A (2016). *Collaborative Governance dalam Pengembangan Kerajinan Blangkon di Kecamatan Serengan Kota Surakarta*. Jurnal.Vol 3, No. 1, 2016.